

**LOCAL STRONGMAN DI BANGKALAN:
KUASA POLITIK “BLATER” DALAM DEMOKRASI LOKAL 2008-2018**

**LOCAL STRONGMAN IN BANGKALAN:
THE POWER OF BLATER IN LOCAL DEMOCRACY 2008-2018**

Moh. Zainor Ridho

(Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten, Jl. Jenderal Sudirman No. 30, Banten;
email: zainor.ridho@uinbanten.ac.id)

Naskah diterima: 21 Mei 2020, direvisi: 4 September 2020,
disetujui: 30 September 2020

Abstract

Decentralization has triggered the emergence of the phenomenon of “local strongmen” in various regions, such as Banten, West Nusa Tenggara, Sulawesi, Jambi and Bangkalan. In a local political contestation, the phenomenon of the “local strongmen” forms an accommodation triangle between bureaucrats, politicians and non-formal elites. The accommodative triangle implements government policies to gain political legitimacy from the local political arena. Decentralization or local democracy has substantially produced “local strongmen” who have a very big role and influence in the realm of local politics. Culturally, “local strongmen” make use of the agents of violence that are formed together with their networks. This study will answer several research questions, namely; Why was blater involved in local political contestation in Bangkalan Regency? and What about blater’s political power in local political contestation in Bangkalan? The method used is qualitative method. Qualitative method is the method to explore and understand the text and contexts from social contexts or human contexts. blater as the local boss has enormous power to determine the replacement of local political leadership in the regional head elections directly. Second, direct regional head elections have created new local bosses or local strongmen such as blater to control political control in the regions. Third, the strong influence of local political control by a blater can prove when Fuad Amin (blater) was elected as a Member of the DPR RI FPKB for the 1999-2004 period. The second evidence is that in 2003, Fuad Amin (blater) was elected as Regent of Bangkalan for the 2003-2008 and 2008-2012 periods. And the last evidence is that in 2019 election, Fuad Amin (blater) elected as Chief of Regional Representative Council in Bangkalan. “local strongmen” take advantage of the linkage family both blood relations, descent and kinship relationship. The involvement of “local strongmen” in the elections for the Regent and Deputy Regent of Bangkalan is interesting to research and prove. The dynamics of political election for the Regent and Deputy Regent in Bangkalan, there were various elements of strength possessed by “local strongmen” (blater), namely political, social, cultural and economic power.

Keywords: local strongmen; blater; local democracy

Abstrak

Desentralisasi telah memicu lahirnya fenomena “orang kuat lokal” di berbagai daerah, seperti Banten, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Jambi, dan Bangkalan. Dalam sebuah kontestasi politik lokal, fenomena keberadaan “orang kuat lokal” membentuk segitiga akomodasi antara birokrat, politisi dan elit non-formal. Segitiga akomodatif tersebut, menjalankan kebijakan pemerintah untuk mendapatkan legitimasi politik dari arena politik lokal. Desentralisasi atau demokrasi lokal, secara substansial telah melahirkan “orang kuat lokal” yang memiliki peran dan pengaruh yang sangat besar di ranah politik lokal. Secara kultural, “orang kuat lokal” memanfaatkan agen-agen kekerasan yang dibentuk bersama jaringan-jaringannya. Maka tulisan ini akan menjawab beberapa pertanyaan yaitu; Mengapa *blater* terlibat dalam kontestasi politik lokal di Kabupaten Bangkalan? dan Bagaimana kuasa politik *blater* pada kontestasi politik lokal di Bangkalan? Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. *Blater* sebagai bos lokal memiliki kekuasaan yang sangat besar untuk menentukan pergantian kepemimpinan politik lokal di daerah dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. *Kedua*, pemilihan kepala daerah secara langsung telah menciptakan bos lokal baru atau orang kuat lokal seperti, *blater* untuk menguasai penguasaan politik di daerah. *Ketiga*, kuatnya pengaruh penguasaan politik lokal oleh seorang *blater* dapat buktikan ketika Fuad Amin (*blater*) terpilih sebagai Anggota DPR RI FPKB periode 1999-2004. Bukti kedua yaitu pada tahun 2003, Fuad Amin (*blater*) terpilih sebagai Bupati Bangkalan periode 2003-2008 dan 2008-2012. “Orang kuat lokal” memanfaatkan *linkage family* baik hubungan darah, keturunan dan hubungan kerabat. Terdapat berbagai unsur kekuatan yang dimiliki oleh “orang kuat lokal” (*blater*) yaitu kekuatan politik, sosial, budaya, dan ekonomi.

Kata kunci: orang kuat lokal; *blater*; demokrasi lokal

PENDAHULUAN

Politik lokal, pada dasarnya membicarakan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Politik lokal juga diartikan sebagai interaksi antar-aktor dalam satu wilayah sehingga mencetuskan dinamika politik di dalamnya. Politik lokal dimaknai juga sebagai representasi dari politik pusat. Mengidentifikasi dua bentuk peran pemerintah pusat dalam politik lokal: *pertama*, pemerintah pusat membuat keputusan pembangunan secara langsung melalui kementerian di tingkat pusat dan mengawal proyek tersebut untuk kepentingan rakyat di daerah. *Kedua*, pemerintah pusat mengembangkan model pengaturan sebagai pemegang kekuasaan negara terhadap isu-isu yang berkembang di aras lokal.

Demokrasi langsung dan elit lokal mewarnai dinamika politik lokal setelah ada tarik-menarik kepentingan antara pusat dan daerah. Lahirnya politik desentralisasi atau politik lokal merupakan salah satu cikal bakal dari politik sentralisasi yang dijalankan oleh pemerintahan Orde Baru dengan ciri-ciri sistem pemerintahan yang otoritarian. Runtuhnya rezim Orde Baru telah melahirkan Undang-Undang (UU) Pemerintahan Daerah No. 22 Tahun 1999 sebagai ganti dari UU No. 5 Tahun 1974. UU No. 22 Tahun 1999 dibuat untuk memenuhi tuntutan reformasi, yaitu mewujudkan suatu Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran penyelenggaraan pemerintahan di daerah dari model sentralisasi ke arah desentralisasi dengan *starting point* pada penggunaan kekuasaan pemerintah pusat terhadap daerah ke arah peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat¹. UU No. 22 tahun 1999 membawa perubahan yang sangat fundamental mengenai mekanisme hubungan antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Pemerintah Pusat. Ada beberapa ciri khas yang menonjol dari UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 114 ayat 1.

Pertama, Demokrasi dan Demokratisasi, diperlihatkan dalam dua hal, yaitu mengenai rekrutmen pejabat Pemda dan yang menyangkut proses legislasi di daerah; *Kedua*, Mendekatkan

pemerintah dengan rakyat, titik berat otonomi daerah diletakkan kepada Daerah Kabupaten dan Kota, bukan kepada Daerah Propinsi; *ketiga*, Sistem otonomi luas dan nyata, Pemda berwenang melakukan apa saja yang menyangkut penyelenggaraan pemerintah, kecuali 5 hal yaitu yang berhubungan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan negara, moneter, sistem peradilan, dan agama; *keempat*, Tidak menggunakan sistem otonomi bertingkat, daerah-daerah pada tingkat yang lebih rendah menyelenggarakan urusan yang bersifat residual, yaitu yang tidak diselenggarakan oleh Pemda yang lebih tinggi tingkatannya; *kelima*, *No mandate without founding*, penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah harus dibiayai dari dana Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN); dan *terakhir*, Penguatan rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), penguatan tersebut baik dalam proses rekrutmen politik lokal, ataupun dalam pembuatan kebijakan publik di daerah.²

Secara signifikan, desentralisasi berperan dalam menciptakan *good governance* dan demokratisasi dengan menjamin partisipasi publik yang lebih besar dalam pembangunan. Desentralisasi biasanya dianggap memberikan kesempatan yang lebih baik bagi partisipasi komunitas-komunitas lokal dalam pembuatan kebijakan. Situasi ini tidak menafikan akan keberadaan elit lokal yang memiliki akses terhadap kekuasaan untuk mengatur dan mengontrol kebijakan pemerintahan demi tercapainya tujuan kepentingan elit atau komunitas-komunitas tertentu. Desentralisasi, lebih jauh, dianggap akan memberi prioritas yang lebih besar bagi berbagai kebutuhan lokal dalam pembangunan, karena ia mendorong pertanggungjawaban yang lebih besar dari mereka yang memerintah kepada komunitas-komunitas lokal. Desentralisasi juga dapat memperkuat stabilitas politik, dan bahkan kesatuan nasional.³ Dalam desentralisasi diperlukan kontrol lokal terhadap prioritas dan sumber daya pembangunan merupakan salah satu tujuan utama dari program desentralisasi

² *Ibid*, hlm. 49

³ Vedi R. Hadiz, *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*, Jakarta: LP3ES, 2005, hlm. 275.

¹ Siti Aminah, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 49.

di Indonesia. Namun sebaliknya, desentralisasi menjadi zona aman bagi elit lokal atau bos lokal untuk mengamankan akumulasi kepentingan politik mereka dalam pembangunan daerah mereka sehingga lebih menonjol kepentingan para bos politik lokal yang predator.

Desentralisasi dan demokrasi merupakan dua konsep yang saling mendukung dalam perpolitikan lokal. Dalam politik lokal, dinamika demokrasi dan desentralisasi bergerak untuk menghasilkan perubahan signifikan yang memberi efek positif terhadap seluruh masyarakat lokal. Di sisi lain, demokrasi dan desentralisasi dalam politik lokal memberi efek negatif terhadap masyarakat lokal. Politik desentralisasi sarat dengan muatan kekerasan dan kekuasaan. Kekerasan dan kekuasaan dianggap sebagai pembenar dari sisi demokrasi karena menjadi sumber utama dalam melanggengkan kekuasaannya baik di tingkat Kabupaten/Kota atau pun tingkat Propinsi. Hal ini dipahami dalam kerangka demokrasi. Fenomena-fenomena kekerasan dalam kontestasi kekuasaan lokal akan menjadi kekerasan politik dan kekerasan sosial. Kekerasan politik di tingkat Kabupaten/Kota dipengaruhi oleh elit-elit lokal yang masih memusatkan perhatiannya pada stabilitas kekuasaan. Sementara, institusi atau organisasi sosial kemasyarakatan (LSM/Ormas) di daerah kurang proporsional untuk mengontrol politik kekuasaan elit lokal akibat dari terpaan praktik kekuasaan penguasa yang eksekutif dan hegemonik.

Dalam konteks demokrasi langsung, desentralisasi telah melahirkan persoalan tersendiri yaitu menjamurnya kekuatan-kekuatan elit politik lokal sebagai orang kuat lokal. Desentralisasi justru sebagai arena munculnya elit lokal yang menyalahi koridor demokrasi. Di beberapa kasus, elit-elit lokal mewakili kelompok masyarakat tertentu dengan mengambil manfaat dari kesempatan yang diperoleh dari desentralisasi, atau membuatnya agar terjadi dan memobilisasi para pendukung untuk secara agresif mengontrol ekstraksi kekuasaan yang sangat besar. Melihat munculnya elit lokal di berbagai daerah termasuk di Bangkalan, salah satunya disebabkan lemahnya kontrol masyarakat terhadap kekuasaan yang

sangat besar. Desentralisasi justru memberikan otonomisasi politik terhadap pemerintah daerah yang dimanfaatkan oleh sebagian kepala daerah untuk melanggengkan kekuasaannya yang mengarah pada bentuk dinasti politik.

Terbukti, misalnya di Kabupaten Bangkalan, setelah reformasi 1998 otonomi daerah atau desentralisasi menjadi ruang untuk memperlebar dan memperkuat kekuasaan elit lokal di daerah. Pergeseran paradigma dari sentralisasi kekuasaan ke arah desentralisasi menunjukkan adanya interaksi politik yang sentralistik. Proses menjadi elit lokal memungkinkan terjadinya interaksi politik yang berbeda kepentingan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Pola dan interaksi hubungan antara elit politik dengan elit politik lainnya, hubungan antara elit penguasa dengan massa, interaksi antara lokal dengan pusat, serta pengaruh dan dimensi budaya yang berkembang pada masyarakat lokal dalam memilih seorang pemimpin⁴. Bahwa desentralisasi terbukti melahirkan politik oligarki atau politik dinasti. Di Bangkalan, (*blatèr*) sebagai elit politik lokal mampu membangun daerah dengan jaringan kekeluargaan. Peran dan pengaruh *blatèr* sebagai elit lokal menjadi kekuatan tersendiri selain pengaruh kiai. Hal ini dilihat karena homogenitas ke-NU-an di Bangkalan dan Madura pada umumnya, menyebar ke seluruh lapisan para santri dan masyarakat di pedesaan maupun perkotaan. Sehingga loyalitas dan kepatuhan para santri dan masyarakat terhadap elit lokal yaitu kiai yang berbasis pada kultur NU akan semakin mempertegas kedudukan dan peran elit tersebut.

Dalam konteks ini, ada dua hal penting untuk memahami tipologi elit dalam politik lokal, yaitu: *pertama*, elit politik lokal merupakan seseorang yang menduduki jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dengan proses demokratis di tingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tingkat tinggi di tingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Mereka adalah Gubernur, Bupati,

⁴ Moch Nurhasim (ed.), *Konflik Antar Elit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 11.

Walikota, Ketua DPRD, termasuk anggota DPRD, dan pemimpin-pemimpin partai politik. Dan *kedua*, elit non-politik lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elit non-politik ini seperti: elit keagamaan (kiai), elit organisasi kemasyarakatan (NU/MUI/dll), kepemudaan, profesi dan lain sebagainya⁵.

Preskripsi di atas menunjukkan bahwa *pertama*, RKH. Fuad Amin Imron adalah *elit non-politik lokal*. Preferensi ini membuktikan bahwa ia adalah cucu dari KH. Mohammad Kholil Bangkalan (Syaikhona Kholil Bangkalan), seorang ulama besar Madura. Ia adalah menjadi sosok yang sangat dihormati dan disegani karena kharisma yang dimilikinya. Selain keturunan kiai, ia juga keturunan dari keluarga Ke-raden-an yang mewarisi pengaruh besar dari darah awalnya sebagai cucu. Syaikhona Kholil disebut sebagai guru dari para guru, karena muridnya banyak yang menjadi kiai atau ulama besar di Jawa dan Madura. Salah satunya ialah KH Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU). Ulama lain yang pernah nyantri kepada Syaikhona Kholil adalah KH Abdul Wahab Chasbullah (pendiri Pesantren Tambak Beras, Jombang), KH Bisri Syansuri (pendiri Pesantren Denanyar, Jombang), KH Ma'shum (pendiri Pesantren Lasem, Rembang, adalah ayahanda KH Ali Ma'shum), KH Bisri Mustofa (pendiri Pesantren Rembang), dan KH As'ad Syamsul Arifin (pengasuh Pesantren Asembagus, Situbondo)⁶.

Kedua, Fuad Amin dikategorikan juga sebagai "orang kuat lokal". Dalam satu dasawarsa terakhir ini, RKH. Fuad Amin Imron merupakan tokoh sentral di Bangkalan Madura, baik di kalangan tokoh formal maupun non-formal dalam diri tokoh yang sepuluh tahun memimpin Bangkalan. Keberagaman potensi yang dimilikinya ini telah ditransformasikan secara

elegan dalam kepemimpinan birokrasi yakni

sebagai Bupati Bangkalan. Potensi ini terbentuk karena dua faktor yang selama ini melekat dalam dirinya, baik dalam perspektif internal maupun eksternal. RKH Fuad amin menjadi Bupati Bangkalan sejak terpilih melalui mekanisme pemilihan suara di DPRD untuk periode 2003-2008 yang dicalonkan oleh PKB dan berpasangan dengan Muhammadiyah dari PDIP. PKB yang merupakan Fraksi mayoritas di parlemen dengan rincian FKB 25 kursi dan FPDIP sebanyak 7 kursi, sementara calon Bupati yang lain Ir H Sulaiman dan Sunarto BA diajukan oleh FPAU. Kemenangan RKH Fuad Amin didukung hampir mayoritas anggota parlemen dengan jumlah total 42 suara dengan demikian mendapat tambahan 5 suara dari fraksi TNI/Polri dan FPAU sebanyak 5 suara. Di Kabupaten Bangkalan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dilaksanakan untuk pertama kalinya pada tanggal 23 Januari 2008.

Mayoritas dari *blatèr* mem-back up penuh Kyai Fuad dalam pencalonan Bupati. Di samping ada jajaran birokrasi hingga ke tingkat kecamatan dan desa ikut serta memberikan dukungan penuh kepadanya. Bahkan, politik birokrasi cukup efektif untuk memobilisasi dan mengorganisasi suara dalam pemilihan KH. Fuad Amin pada Pemilihan Kepala Daerah secara langsung 2008. Selain komunitas *blatèr* dan santri, KH. Fuad Amin didukung oleh berbagai Ormas. OKP, LSM, Paguyuban dan lembaga-lembaga sejenis lainnya. Pada pemilu 2012 setelah tidak bisa mencalonkan lagi sebagai Bupati Bangkalan, RKH Fuad Amin berupaya meneruskan dinasti politiknya dengan mencalonkan anak laki-lakinya.⁷

Basis sosial keagamaan dibangun melalui konstruksi sosial sebagai keturunan Syaikhona Kholil, ulama kharismatik yang menjadi panutan dan ikon spiritual keberagaman kaum Nahdiyyin, khususnya di Bangkalan Madura. Dengan kharisma yang dimiliki oleh Syaikhona

⁵ *Ibid*, hlm. 13.

⁶ "KH.Fuad Amin Imron Cucu Seorang Ulama Besar Madura Yang Salah Jalan", (*online*), (http://www.kompasiana.com/iskandariyah/kh-fuad-amin-imron-cucu-seorang-ulama-besar-madura-yang-salah-jalan_54f3b4547455139d2b6c7cf3, diakses 13 Desember 2015).

⁷ Yudhi Rachman, "Pilkada, Dinasti Politik di Era Desentralisasi: Studi Habitus dan Field, Aktor Politik dalam Kontestasi Pilkada Kab, Bangkalan yang Melahirkan Dinasti Politik", Seminar Nasional Gender dan Budaya Madura III Madura: Perempuan, Budaya & Perubahan, (*online*), (<http://lppm.trunojoyo.ac.id/budayamadura/download>, diakses 15 Juli 2020).

Kholil, dimanfaatkan oleh Fuad Amin untuk menopang kekuasaannya di Bangkalan. Basis sosial (ke)*blatèr*(an) digunakan juga melalui kendali atas jaringan para *klèbun* (kepala desa), yang umumnya berasal dari basis sosial *blatèr*. Kedekatannya dengan kedua basis sosial ini membuat FA dikenal dengan julukan Kiai *blatèr*⁸.

Atas dasar deskripsi di atas, maka tulisan ini akan memfokuskan pada kuasa politik *Blatèr* dalam kontestasi politik lokal di Kabupaten Bangkalan 2012-2018. Selanjutnya, penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan penelitian, yaitu mengapa *blater* terlibat dalam kontestasi politik lokal di Kabupaten Bangkalan? Bagaimana peran politik *blater* pada kontestasi politik lokal di Bangkalan?

KERANGKA TEORITIS

A. Kekuasaan *Blatèr*

Kekuasaan, menurut Karl D. Jackson⁹ didefinisikan secara perilaku sebagai interaksi antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok di mana pada saat tertentu seorang pelaku (yang mempengaruhi) mengubah perilaku pelaku kedua (yang dipengaruhi). Maka dalam hal ini, Jackson menamakan dengan kekuasaan tradisional dan kewibawaan tradisional.

Kekuasaan tradisional adalah karena kekuasaan yang dipunyainya hampir selalu bergantung pada berlalunya waktu dan karena itu kerap kali dilegitimasi oleh pewarisan dari generasi yang satu kepada generasi yang lain. *Pertama*, daya tahan hubungan kewibawaan tradisional lebih dihitung dalam dasa warsa dalam ketimbang tahunan. Apabila kebiasaan patuh kepada pemimpin tertentu telah ada untuk lebih dari dua puluh lima tahun, dan jika hubungan ini diwarisi dari ayah seseorang, untuk mengganti para pemimpin karena hal-hal sepele yang berlalu cepat seperti cap-cup partai dan isu-isu politik akan merupakan pelanggaran salah fungsi baik kearifan yang tak lekang dimakan waktu,

⁸ Abdur Rozaki, "Melawan Oligarki Politik Lokal", (*online*), (<https://adoc.pub/melawan-oligarki-politik-lokal-abdur-rozaki.html>, diakses 15 Juli 2020).

⁹ Karl D. Jackson, *Kewibawaan Tradisional, Islam, dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat*, Jakarta: Grafiti Press, 1989, hlm. 201.

maupun tatakrama. Hubungan kewibawaan tradisional bukanlah sekadar ikatan kesempatan dan kenyamanan, melainkan dipandang sebagai ikatan yang mempertautkan baik pemimpin, maupun pengikut kepada generasi-generasi terdahulu. Ikatan-ikatan kewibawaan tradisional memantapkan kesinambungan tempat individu baik dalam masyarakat tertutup masa lalu, maupun masyarakat kini yang lebih terbuka. Hubungan ini sah bukan saja karena hubungan ini efisien dan makmur, melainkan karena hubungan ini melintasi waktu dengan cara-cara yang dibenarkan oleh para tertua.¹⁰

Kedua, "tradisional" menyiratkan bahwa kepemimpinan agaknya lebih berpindah ke mereka yang memiliki martabat warisan (*inherited status*) ketimbang martabat hasil pencapaian (*achieved status*). Misalnya para pemangku kewibawaan tradisional di sebuah desa sering kali termasuk keluarga atau kelompok dari keluarga-keluarga yang bermartabat lebih tinggi yang sama. Namun biasanya pilihan berpindah ke bahu seperangkat keluarga yang punya pengetahuan keagamaan atau sekuler yang khusus atau peranan istimewa dalam evolusi bersejarah masyarakat itu. Kewibawaan tradisional dan patronase (atau hubungan-patron-klien) jelas-jelas berbagi banyak kualitas¹¹. Patron atau tokoh kewibawaan tradisional yang berjaya adalah seseorang yang memantapkan dirinya sebagai perantara yang mutlak diperlukan antara sekelompok yang memiliki beraneka-ragam ketrampilan yang saling melengkapi. Baik para patron maupun para tokoh kewibawaan tradisional berhubungan dengan para pengikut mereka melalui pertukaran yang asimetris¹².

B. Teori Patron-Client

Istilah patron-client berasal dari kata patronase dan klientalisme. Dua istilah tersebut adalah dua hal yang berbeda, di satu

¹⁰ E Hagen, *On the Theory of Social Change*, hlm. 55-75 dan Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, hlm. 341-358, dalam Karl D. Jackson, *Kewibawaan Tradisional, Islam, dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat*, Jakarta: Grafiti Press, 1989, hlm. 203.

¹¹ *Ibid*, hlm. 204.

¹² *Ibid*, hlm. 204.

sisi penerapannya berbeda namun, di sisi yang lain patronase dan klientisme pun bisa bergandengan dalam penerapannya bahkan bisa saling menguatkan. Klientisme secara harfiah istilah klientisme berasal dari kata *cluere* yang artinya adalah mendengarkan atau mematuhi. Kata ini muncul pada era Romawi kuno yang menggambarkan relasi antara *clientela* dan *patronus*. *Clientela* pada era ini adalah istilah untuk menyebut kelompok orang yang mewakili suaranya kepada kelompok lain yang disebut *patronus*, yang merupakan sekelompok aristokrat. Selanjutnya, disebutkan bahwa *clientela* merupakan pengikut setia dari *patronus* lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan pada orang lain yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih rendah (klien) yang memberikan dukungan dan bantuan kepada patron.

Kelompok parton-klien adalah salah satu bentuk pengelompokan yang biasa terjadi dalam masyarakat mana pun di dunia ini. Sebagaimana yang dijelaskan James C. Scott dalam Maswadi Rauf bahwa kelompok patron-klien sebagai hubungan *dyadic* (dua orang) yang terdiri dari seorang dengan status sosio-ekonomi yang lebih tinggi (patron) yang menggunakan pengaruh dan sumber-sumber kebutuhan hidup (*resources*) yang dimilikinya untuk memberi perlindungan dan keuntungan bagi orang lain (klien) yang membalasnya dengan memberikan dukungan dan bantuan, termasuk pelayanan pribadi, bagi patron¹³.

C. Local Strongman (Orang Kuat Lokal)

Dalam konteks ini, pengaruh elit lokal dalam setiap kontestasi politik di daerah terutama pada pemilihan langsung kepala daerah banyak dijumpai peran besar seorang tokoh kuat lokal atau *local strongman*¹⁴ baik dari kalangan, *blatèr*,

tuhan tanah atau pengusaha. Istilah *local strongman* atau “orang kuat lokal” dalam beberapa kajian ilmiah memiliki konsepsi yang sama dengan istilah-istilah lain seperti, *local broker*, *patron*, dan *client*. Menurut pandangan Joel Migdal, *local strongman* dapat dipahami dari tiga argumentasi yang saling terkait yaitu: *pertama*, *local strongman* dapat digambarkan sebagai elit atau tokoh lokal yang berpengaruh besar terhadap kepala daerah dan birokrat lokal dalam kepentingan sosial atau yang disebut dengan *triangle of accommodation*. *Kedua*, *local strongman* menjadi kontrol sosial dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal. Dengan kata lain, orang kuat tidak hanya memiliki legitimasi dan dukungan sosial tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan semua masyarakat. Kategori kedua ini, menurut John T. Sidel sama halnya dengan istilah lain yaitu: *personalism*, *clientelism*, dan hubungan *patron-client*. Dan *ketiga*, *local strongman*, menurut pendapat Migdal adalah seseorang yang berhasil menguasai terhadap daerah atau negara dalam banyak hal termasuk dalam memengaruhi segala kebijakan kepala daerah atau pemerintah. Orang kuat mampu menguasai terhadap penguasaan politik lokal baik dalam pemilihan kepala daerah atau mempengaruhi terhadap kebijakan pemerintah¹⁵.

Dalam konteks politik lokal, *bosisme* lokal merupakan bentuk perwujudan dari Walikota, Bupati, Gubernur, dan Anggota legislatif yang menjadi *king maker* atau makelar kekuasaan bagi patron politik di tingkat nasional dan *broker* kekuasaan bagi klien politik di tingkat daerah serta menjadi orang yang paling berkuasa di suatu daerah untuk mengeksploitasi rakyat dan alam yang ada di dalam wilayah kekuasaan mereka. Para *bosisme* lokal ini muncul melalui mekanisme pemilu yang kompetitif dan berkala serta diikuti partisipasi politik yang tinggi. Mereka

makna dengan istilah-istilah lain yang memiliki konsep yang sama misalnya, John T. Sidel menggunakan istilah Bossism untuk menunjukkan Bos Lokal di daerah yang menguasai di berbagai kehidupan politik yang dalam tulisannya mengenai “Bossism and Democracy in The Philippines, Thailand, and Indonesia: Towards an Alternative Framework for the Study of “Local Strongman”.

¹⁵ Sidel, *Op.cit.*, hlm. 52.

¹³ Maswadi Rauf, *Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah Penajagan Teoritis* Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2001, hlm. 99

¹⁴ Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Joel Migdal dalam penelitiannya di berbagai negara termasuk Indonesia yang terkait dengan fenomena politik lokal di Indonesia. Istilah *Local Strongman* kemudian mengalami transformasi

menggunakan berbagai strategi dari pembelian suara, manipulasi hingga intimidasi dengan penggunaan kekerasan¹⁶.

Di dalam elit yang berkuasa terdapat istilah *bossism*. *Bossism*, secara konseptual adalah istilah yang muncul dari kritik Sidel atas *Local Strongman* Joel Migdal. Analisa Migdal didasarkan pada studi empiris yang ditemukan pada negara post-kolonial pada dekade 1970. Temuan Migdal menunjukkan bahwa dalam *weak state* ternyata terkandung *strong society* yang didominasi oleh elit tradisional dan *local strongman*.¹⁷ Ada tiga proposisi yang diajukan oleh Migdal dalam meninjau konsep ini. *Pertama*, *local strongman* hanya dapat berdiri jika tidak terdapat kontrol sosial yang kuat, fragmentasi atas kontrol memungkinkan aktor ini dapat bergerak bebas dalam memperluas wilayah kekuasaan, termasuk bekerjasama dengan elit negara ataupun birokrat lokal. *Kedua*, *local strongman* umumnya memiliki strategi bertahan dengan menguasai hajat hidup penduduk lokal, yang berdasarkan kondisi ini ia memperoleh basis legitimasi yang kuat di kalangan *grassroot*. *Ketiga*, pembangunan nasional seringkali terhambat dengan eksistensi *local strongman*, kasus yang bagi Migdal banyak terjadi di negara dunia ketiga.¹⁸ Konsep boss, berbeda dari patron, karena tingkat monopoli diperoleh melalui koersi, sebagai pilar utama, dan di sisi lain otoritas boss, tidak bergantung pada afeksi dan status, melainkan atas dasar hasrat untuk bertindak.¹⁹ Berbeda dari *local strongman* yang berada di luar jangkauan *weak state*, *local bossism* menggunakan dan bergantung pada agen dan sumberdaya milik negara.²⁰

Dua kerangka teoritik yang dikemukakan oleh Joel Migdal dan John T. Sidel merupakan gejala fenomena munculnya *local strongman* atau *local bossism*. Gagasan *local strongman* (orang kuat lokal) pertama kali dikenalkan oleh Migdal. Migdal menjelaskan bahwa setiap komunitas dalam masyarakat terdapat pemimpin yang tidak berafiliasi dengan kelompok kepentingan dengan memiliki kebebasan tersendiri untuk mengarahkan semua kepentingan yang mereka miliki. Biasanya, "orang kuat lokal" relatif otonom dari kepentingan negara. Karena mereka memiliki sumber-sumber kekuasaan baik berupa *social capital* atau *economic capital* yang jarang dimiliki oleh kebanyakan orang sehingga *strongman* memiliki kekuasaan penuh pada tingkat lokal. Oleh karena itu, munculnya "orang kuat lokal" di daerah merupakan bentuk dari kuatnya kekuasaan pada masyarakat.²¹

METODOLOGI

Metode penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang – oleh sejumlah individu atau sekelompok orang – dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan²². Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati²³. Berdasarkan definisi tersebut, maka tipe penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena sosial-politik yang diteliti, kemudian menganalisis dengan mengklasifikasi dan mengkategorikan berdasarkan data-data yang diperoleh. Tipe penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Dalam hal ini, yang akan dideskripsikan dan kemudian dianalisis adalah kuasa politik dan peran politik *Blater* pada kontestasi politik lokal di Bangkalan.

¹⁶ John T. Sidel, *Capital, Coersion and Crime: Bossism in the Philippines*, Stanford: Stanford University Press, 1999, hlm. 1-22. Atau dalam Melvin Perjuangan HutaBarat, *Fenomena Boss Lokal di Indonesia Era Desentralisasi*, Depok: Tesis Fisip UI, 2012, hlm. 20

¹⁷ John T. Sidel, "Philippine Politics in Town, District, and Province: Bossism in Cavite and Cebu." *The Journal of Asian Studies*, Vol. 56, No. 4 Nov., 1997, hlm. 949.

¹⁸ Joel S. Migdal, *Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World*. Princeton: Princeton University Press, 1988, hlm. 238-258.

¹⁹ Sidel, *op.cit.* hlm. 952.

²⁰ John T. Sidel, "Capital, Coercion, and Crime: Bossism in the Philippines." Review by Benedict J. Tria Kerkvliet. *The Journal of Asian Studies*, Vol. 61, No. 4, Nov., 2002, hlm. 1440-1442.

²¹ *Ibid*, hlm. 52.

²² John W. Creswell, *Research Design: Penekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran* (terjemahan), Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 4

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2004, hlm. 3

PEMBAHASAN

A. *Blater: The Social Original*

Di Madura, istilah *blatèr* dan *bejhing* (*abejhing*) berkembang pasca penjajahan. Istilah *blatèr* atau *bejhing* (*abejhing*) tidak pernah disebutkan dalam berbagai literatur baik dalam kajian sejarah atau pun politik. Hanya saja ada stereotipe-stereotipe tentang orang Madura, seperti berani, lebih kasar, dan lain-lain, yang menjadi cikal bakal lahirnya sosok *blatèr*. Dalam H.N. Kilian (1905), P. Penninga dan H. Hendriks (1936) hanya ada kata “badjingan” (kata ini digunakan untuk merujuk pada *blatèr* oleh sebagian orang Madura). Sedangkan di dalam kamus Belanda-Madura “badjingan” berarti “bangsat atau bhangsat”. Tetapi menurut Asis Safioedin (1975 dan 1977) dalam kamus Madura-Indonesia tidak ada kata “*blatèr* atau badjingan”.

kata “badjingan” atau “preman dan jago”. *Ketiga*, dalam konteks tertentu, makna *blatèr* jauh lebih luas dari sekedar kekerasan. Dan *keempat*, kata *blatèr* mengandung makna yang berhubungan dengan *kharismatic leader* atau kepemimpinan kharismatik. *Blatèr* dimaknai sebagai perilaku seseorang yang mengarah pada tindakan kekerasan atau carok. *Blatèr* juga dipandang sebagai sikap keberanian seseorang terhadap pembelaan harga diri atau kehormatan.

Dalam fenomena sosial politik, *blatèr* sebagai patron dari masyarakat atau jaringannya mampu mempengaruhi terhadap pilihan politik masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2012 di Kabupaten Bangkalan. Sehingga, calon yang dia dukung dalam kontestasi politik lokal berhasil unggul dibandingkan dengan calon yang lain.

Tabel. 1. Sumber-Sumber Kekuasaan Politik *Blatèr* di Kabupaten Bangkalan

NAMA AKTOR	Fuad Amin Imron	Fuad Amin Imron
STATUS	KIAI	BLATÉR
BASIS MASSA	Santri, Masyarakat Tradisional/awam (desa), Jaringan Alumni, Pengajian, Ormas (NU/MUI/ dan lain-lain), Guru Keagamaan (ustad/guru ngaji/madrasah), Lora/ <i>Bindhereh</i> (madura), dan jaringan relawan.	Jaringan <i>klébon</i> , jaringan <i>béjingan</i> / mafia (carok), pengusaha/kontraktor.
SUMBER PENGARUH	Kharisma, konsisten (istiqomah), bersih (jujur), amanah, trah (keturunan), dan lain-lain.	Kharisma, kekerasan, uang, dan seterusnya.
SIFAT KHUSUS	DISEGANI	DITAKUTI
PERAN POLITIK	Muballigh (dakwah), Pengasuh Pesantren, otoritas keagamaan, ormas (keagamaan), dan lain-lain.	Penguasa Tunggal (otoritas tunggal), <i>gladiator-lobbying</i> , dan komunikator-mobilisator massa (mobilisasi massa).
FASILITAS/SARANA	Pesantren/masjid/musholla/majlim taklim/ madrasah/pengajian umum	<i>Rémo</i> (pesta tradisional bagi <i>blatér</i> , <i>klébon</i> , dan lain-lain)/kerapan sapi/ turnamen/ dan lain-lain.

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Kata *blatèr* menurut Adrian Pawitra adalah seorang figur yang diakui sebagai jagoan kharismatik (jago) yang memiliki pengaruh sangat kuat terhadap masyarakat setempat²⁴.

Merujuk pada konteks di atas, *pertama*, kata *blatèr* dalam realitas sosial politik menjadi fenomena baru selain *jawara*, *jago*, dan *preman*. *Kedua*, kata *blatèr* lebih menonjol daripada

Tabel 1. ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa tipologi sumber kekuasaan yang melekat secara *nature* terhadap tokoh *Blatèr* yaitu Fuad Amin. Aktor utama dalam tabel tersebut adalah Fuad Amin Imron yang menyandang predikat status ganda yaitu kiai dan *blatèr*. *Pertama*, status kiai memiliki basis massa dari kalangan santri, masyarakat pedesaan (awam), jaringan alumni, pengajian, ormas (NU/MUI),

²⁴ *Ibid*, hlm. 88.

guru keagamaan (ustadz/ guru ngaji/madrasah), lora/*bindhereh* (Madura), dan jaringan relawan. Sedangkan status *blatèr* basis massa berasal dari jaringan *klébon*, jaringan *bhéjangan*/mafia (carok), pengusaha/kontraktor, dll. *Kedua*, sumber pengaruh, kiai memiliki sumber pengaruh yang diperoleh dari kharisma, konsisten (*istiqomah*), bersih (jujur), amanah, trah (keturunan), dan lain-lain. Sedangkan *blatèr*, sumber pengaruhnya adalah berupa Kharisma, kekerasan, intimidasi, uang, dan seterusnya. *Ketiga*, sifat khusus yang terdapat pada kiai adalah disegani. Dan sifat khusus bagi seorang *blatèr* yaitu ditakuti. Dengan demikian, Fuad Amin sebagai aktor yang berstatus ganda sebagaikiai dan *blatèr* memiliki sumber kekuasaan yang sangat komprehensif.

Dalam konteks ini, budaya yang berkembang di Madura sejak zaman kolonial Belanda hingga saat ini telah mempengaruhi terhadap sikap dan identitas kepribadian orang Madura. Madura sebagai daerah yang tandus dan gersang, secara ekologis, telah membentuk sifat-sifat seperti, berani, keras, kerja keras, kasar, dan nekat yang melekat pada diri orang Madura. Pada akhirnya, sifat-sifat tersebut menjadi bukti kuat bahwa orang Madura punya *stereotype-stereotype* yang berbeda dengan daerah lain. Maka, lahirnya sosok *blatèr* di Madura merupakan salah satu identitas keberanian seseorang yang didukung oleh berbagai sumber kekuasaan dan latar belakang keturunan yang menjadi kuatnya pengaruh dan peran seorang *blatèr*. Dalam konteks politik, sumber kekuasaan dan latar belakang keturunan menjadi faktor kuatnya pengaruh dan peran seorang *blatèr*. Pada era pemilihan kepala daerah secara langsung, peran dan pengaruh tersebut dimanfaatkan oleh *blatèr* untuk terlibat secara langsung mendukung salah satu pasangan calon pada pemilihan kepala daerah. Kekuatan *blatèr* tersebut ditopang oleh kebudayaan tradisional masyarakat Madura yang sudah berjalan pada zaman kolonial yaitu, kerapan sapi, tari tradisional *thandur*, *remoh*, *to'oto*, dan lain-lainnya.

Dalam konteks pemilihan legislatif 2014, peta politik lokal mengalami pergeseran dari

tahun-tahun sebelumnya. Pergeseran politik lokal tersebut menjadi prioritas utama bagi elit politik lokal atau *blatèr* untuk memperebutkan posisi politik tertentu. Transisi kepemimpinan *Blatèr* pada tahun 2014 ditandai dengan berpindahnya keanggotaan partai politik dari Partai Kebangkitan Bangsa menjadi anggota Partai Gerindra. Fuad Amin terpilih sebagai Ketua Partai Gerindra pada tahun 2014. Kepindahan Fuad Amin dari PKB ke Gerindra membawa dampak yang sangat signifikan terhadap perolehan suara Partai Gerindra mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi, hingga Pusat.

Dalam kaitan itu, pemilu mempunyai beberapa fungsi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. *Pertama*, legitimasi politik, menurut Rodney Barker²⁵, adalah kepercayaan terhadap kebenaran eksistensi negara, termasuk dalam hal wewenangnya mengeluarkan perintah sehingga perintah tersebut diikuti bukan disebabkan oleh adanya rasa takut atau kepentingan pribadi. Menurut Ginsberg, fungsi legitimasi politik merupakan konsekuensi logis yang dimiliki oleh pemilu, yaitu untuk mengubah suatu keterlibatan politik massa dari yang bersifat sporadis dan dapat membahayakan otoritas dan kekuatan politik nasional.

Kedua, fungsi perwakilan politik. Fungsi ini menjadi kebutuhan rakyat, baik dalam rangka mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintah dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilu dalam konteks ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil baik dalam pemerintahan maupun legislatif. *Ketiga*, pemilu sebagai mekanisme pergantian atau sirkulasi elit penguasa. Secara teoritis, hubungan pemilu dengan sirkulasi elit dapat dijelaskan dengan melihat proses mobilitas kaum elit atau non-elit yang menggunakan jalur institusi politik, pemerintahan, dan lembaga masyarakat seperti DPR, DPRD, partai politik, dan ormas.

²⁵ Rodney Barker, *Political Legitimacy and the State*, Oxford: Clarendon Press, 1990, hlm. 1, dalam Syamsuddin Haris (ed.), *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988, hlm. 49.

B. Kuasa Politik *Blater* Terhadap Preferensi Politik

Preferensi bahwa figur *blatèr* dipandang sebagai sosok “orang kuat lokal” yang memiliki pengaruh yang sangat besar adalah pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 di Bangkalan. Menarik untuk dicermati bahwa pada pemilihan presiden dan wakil presiden langsung 2014, pasangan Prabowo-Hatta unggul dengan 644.608 suara atau (81,20%) dan pasangan Jokowi-JK hanya memperoleh 149.258 suara yaitu (18,80%) dari jumlah total 793.866 suara sah sedangkan di Kabupaten Sampang, pasangan Prabowo-Hatta meraih 474.752 suara dan Jokowi-JK memperoleh 162.785 suara dengan selisih 311.967 suara²⁶. Kemenangan ini didasarkan atas beberapa hal yaitu: *pertama*, Kiai Fuad - kiai dan *blatèr* – dipercaya sebagai Ketua Tim Sukses Prabowo-Hatta. Peran dan pengaruh politik yang sangat dominan bagi Fuad Amin mampu menggalang dukungan dari kalangan kiai dan kalangan *blatèr* termasuk dari jaringan *klébon* (kepala desa). Fuad Amin pada pilpres 2014 dapat mengumpulkan sebanyak 1.200 kiai se-Kabupaten Bangkalan termasuk juga Kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumenep untuk mendukung pasangan Prabowo-Hatta. Dukungan ulama dari berbagai pesantren di Madura, Jatim, terhadap pasangan calon presiden Prabowo-Hatta dipengaruhi KH. Fuad Amin Imron sebagai ketua tim sukses pasangan Prabowo-Hatta. Fuad Amin mendeklarasikan dukungan tersebut karena dilandasi komitmen nilai kebangsaan para ulama NU yang senapas dengan pasangan ini. Fuad Amin dapat memobilisasi dan mengorganisasikan seluruh kekuatan yang berasal dari hampir semua kalangan kiai Madura.

Dalam konteks lokal, pemilihan umum presiden (pilpres) secara langsung pada tahun 2014 lalu, Bangkalan mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat. Karena ditengarai menjadi daerah yang memunculkan banyak persoalan, *Pertama*, ditemukan 20 TPS tempat suara Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla mendapatkan suara 18,8 persen suara.

Sedangkan, di Bangkalan, pasangan Prabowo-Hatta meraih kemenangan paling tinggi 81,2 persen dibandingkan dengan seluruh Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur. Khofifah, tim pemenangan Jokowi, menilai modus kecurangan pilpres di Bangkalan adalah *copy-paste* dari pilgub yang membuat Khofifah kalah. Semua dinamika politik Bangkalan itu tak lepas dari figur sentral Fuad Amin. Selain sukses memenangkan diri menjadi Bupati dua periode, Fuad juga berhasil memenangkan banyak pihak yang ia dukung. Mulai kemenangan Soekarwo dalam dua kali Pilgub Jatim, kemenangan anaknya sebagai Bupati, keunggulan partai barunya, Gerindra, dalam pemilu legislatif, sampai kemenangan capres Prabowo di seluruh Madura²⁷.

Kedua adalah lomba kerapan sapi se-Madura (*kerapan sapi*: Madura). Fuad Amin sebagai Tim Sukses pasangan Prabowo-Hatta, dalam konteks ini, adalah dipahami sebagai sosok *blatèr* atau “orang kuat lokal” di Kabupaten Bangkalan. Kerapan sapi sebagai bagian dari budaya Madura menjadi salah satu bentuk media politik untuk memperoleh dukungan langsung dari masyarakat Madura terhadap pasangan Prabowo-Hatta. Secara umum dukungan ini tidak hanya dari masyarakat Madura tetapi yang paling penting adalah dukungan dari tokoh *pengerap*²⁸ di Madura.

Pada pemilihan umum presiden secara langsung di Kabupaten Bangkalan meninggalkan banyak persoalan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Persoalan tersebut adalah instruksi KPU pusat untuk membuka 5.098 kotak suara pada pemilihan umum presiden secara langsung pada tahun 2014. Pembukaan tersebut, dilakukan atas instruksi KPU pusat yang tengah digugat oleh pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

²⁷ “Gerbang Pembuka Skandal Politik Jatim”, (*online*), (<http://arsip.gatra.com/2014-12-08/majalah/artikel.php?pil=23&id=158245> diakses 12 September 2015).

²⁸ *Pengerap* adalah seseorang baik dari elit lokal, tokoh masyarakat atau kalangan *klébon* yang memiliki sapi aduan khusus kerapan sapi dan mereka gemar untuk mengikuti lomba-lomba kerapan sapi baik tingkat kabupaten maupun tingkat nasional (se-Madura). *Pengerap* ini juga identik dengan orang kuat yang memiliki mobilitas ekonomi dan politik di masyarakat setempat.

²⁶ “Politik Indonesia”, (*online*), (www.politikindonesia.com/index.php?, diakses tanggal 17 Juli 2014).

persoalan ini merupakan bentuk tanggung jawab KPU untuk dijadikan dasar pembuktian dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. KPU hanya memerintahkan membuka 136 kotak suara sesuai jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang digugat oleh tim Prabowo-Hatta. Setelah kotak suara dibuka, dengan disaksikan Panitia Pengawas Pemilu, polisi, dan saksi dari masing-masing capres, KPU Bangkalan langsung memilah seluruh formulir dalam kotak suara. Di antaranya absensi atau formulir C7, data daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih KTP (DPKTP), dan daftar pemilih tambahan (DPTb) atau formulir A5. Gugatan yang dilyangkan oleh pasangan Prabowo-Hatta adalah adanya temuan ketidaksinkronan antara perolehan suara dengan daftar pemilih di beberapa TPS di Bangkalan pada Pilpres 9 Juli 2014.

Kekecewaan atas hasil pilpres di Bangkalan sesungguhnya juga dirasakan oleh kubu pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebab, di beberapa TPS perolehan suara pasangan nomor dua tersebut nol. Tim pasangan nomor urut dua, menemukan dugaan kecurangan pemilu di tiga wilayah di Pulau Madura, yaitu di Bangkalan, Kwanyar, dan Sampang. Sehingga perolehan suara untuk pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla di sejumlah TPS di tempat tersebut, pasangan Jokowi-JK mendapat nol suara²⁹.

C. Pengaruh Politik *Blater* Terhadap Kontestasi Politik Lokal

Dalam dinamika politik lokal di Bangkalan, peran dan pengaruh FAI menjadi kekuatan tersendiri selain pengaruh kiai. Sosok RKH. Fuad Amin Imron sebagai Kiai-*blatèr* mampu memanfaatkan statusnya sebagai keturunan Syaikhona Kholil untuk meraih berbagai posisi politik. Di satu sisi, ia sebagai seorang kiai, di sisi yang lain, ia adalah sosok *blatèr* dapat memainkan peran status gandanya dalam dinamika politik lokal di Bangkalan, sehingga pada awal tampil di panggung politik, ia berhasil melenggang menjadi Bupati Bangkalan selama dua periode 2003-2008 dan 2008-2012.

Pada tahun 2008 merupakan awal dimulainya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur secara langsung untuk periode 2008-2013. Dinamika pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diprediksi akan berlangsung dua putaran. Karena di antara beberapa pasangan calon tersebut, tidak ada satu pun pasangan calon yang memperoleh lebih dari 30 persen dari jumlah suara sah dalam pemungutan suara. Dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 32/2004 menyebutkan bahwa apabila tidak ada pasangan calon kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30 persen dari jumlah suarasah, maka akan dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua³⁰.

Jawa Timur merupakan wilayah yang secara ekonomi mengalami kemajuan bahkan dibidang maju, dan secara politik cenderung sangat dinamis. Provinsi ini memiliki 30 Kabupaten dan 8 kota, jumlah penduduknya sekitar 38 juta (2007). Dengan jumlah penduduk relatif besar tersebut, dinamika politiknya membuat pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim menarik untuk dikaji. Munculnya lima pasangan calon dalam Pilgub Jatim 2008 lalu memberikan pilihan yang relatif banyak kepada masyarakat. Meskipun Wakil Gubernur (Soenarjo) dan Sekda Jatim (Soekarwo) ikut dalam pilgub Jatim 2008, hasil akhir pilgub putaran pertama menunjukkan bahwa keduanya tak mampu mendominasi suara pemilih. Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) berada pada posisi teratas dengan 26,44 persen suara, Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji) di posisi kedua dengan 24,82 persen suara, Sutjipto-Ridwan Hisjam (SR) di posisi ketiga dengan 21,19 persen suara, Soenarjo-Ali Maschan Moesa (Salam) di posisi keempat dengan 19,34 persen suara, dan Achmadi-Suhartono (Achsani) di posisi kelima dengan 8,21 persen suara³¹. Sebagaimana yang tertera dalam tabel di bawah ini:

²⁹ "KPU Bangkalan Buka 5.098 Kotak Suara Pilpres", (*online*), (<https://www.tempo.co/read/news/2014/08/13/269599363/kpu-bangkalan-buka-5-098-kotak-suara-pilpres>, diakses pada 15 Juli 2020).

³⁰ "Dua Putaran di Jatim", (*online*), (<http://nasional.kompas.com/read/2008/07/24/00551591/dua.pUtaran.di.jatim>, diakses pada 15 Juli 2018).

³¹ "Peta Pilgub Jatim 2008 dan Potret Kontestasi 2013", (*online*), (wartadesainfo.blogspot.com/2013/06/peta-pilgub-jatim-2008-dan-potret.html, diakses pada 15 Juli 2018).

Tabel 2. Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Putaran Pertama

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Partai Politik	Jumlah Suara	Persentase
5.	Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa)	PD-PAN	111.228	26,44
1.	Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji)	PPP	111.185	24,82
2.	Sutjipto-Ridwan Hisjam (SR)	PDIP	53.673	21,19
3.	Soenarjo-Ali Maschan Moesa (Salam)	GOLKAR	68.250	19,34
4.	Achmadi-Suhartono (Achsani)	PKB	67.738	8,21
JUMLAH SUARA SAH				

Sumber: diolah dari hasil rekapitulasi KPU Bangkalan

Pada tabel di atas terlihat bahwa komposisi perolehan suara pilgub Jatim harus dilaksanakan dua putaran, yang diikuti oleh Karsa dan Kaji. Putaran kedua pilgub yang dilaksanakan tanggal 4 November 2008 menarik untuk dikaji, khususnya berkaitan dengan peran aktor: siapa melakukan apa dengan mengandalkan modal apa untuk melakukan perannya tersebut. Aktor-aktor, baik dari partai politik, birokrasi maupun pengusaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat (ormas) tampak sibuk. Mesin partai relatif bekerja dibandingkan dengan Pilgub putaran pertama. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya suara pasangan Khofifah

Sementara hasil penghitungan manual KPU Jawa Timur, pasangan Karsa mendapat 7.729.944 suara atau 50,20 persen, dan pasangan Kaji mendapat 7.669.721 suara atau 49,80 persen. Perolehan hanya selisih 60.223 suara atau 0,4 persen, dan 506.343 suara dinyatakan sebagai tidak sah. Hasil inilah yang lantas menuai protes tim Kaji dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sampai akhirnya MK mengabulkan gugatan dengan menggelar pemilihan ulang di Bangkalan dan Sampang, Madura, serta hitung ulang di Pamekasan. Hanya saja, hasil pemilihan dan hitung ulang tetap memenangkan pasangan Karsa atas Kaji.

Tabel 3. Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Kabupaten Bangkalan tahun 2008 Putaran Kedua

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Partai Politik	Jumlah Suara	%tase
1.	Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa)	PD-PAN	291.781	50,20
2.	Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji)	PKB-PPP	151.666	49,80
JUMLAH SUARA SAH			443.447	100,00

Sumber: diolah dari hasil rekapitulasi KPU Bangkalan

Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji) pada putaran kedua, setelah PDIP bergabung dan menyokong Khofifah, suara antarkeduanya tidak terpaut jauh. Hasil rekapitulasi 38 KPU Kabupaten/kota menunjukkan bahwa pasangan Kaji mendapatkan suara 49,8 persen dan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa) 50,2 persen. Kaji menang di 16 Kabupaten/kota dan Karsa menang di 22 Kabupaten/kota. Ini berarti Karsa menang 0,4 persen.

Pada Pilgub Jawa Timur yang sangat dinamis, tahun 2008, Bangkalan bersama Sampang tercatat sebagai penentu kemenangan tipis Soekarwo atas Khofifah Indar Parawansa. Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Pilgub ulang di Bangkalan dan Sampang karena terjadi kecurangan sistematis, terstruktur, dan massif. Pilgub Jawa Timur, Agustus 2013, Khofifah kembali menantang Soekarwo. Bangkalan Kembali tercatat sebagai salah

satu titik kontroversial kemenangan Soekarwo. Kali ini, gugatan Khofifah kalah di MK³².

terdiri dari 7 anggota, Fraksi TNI dan POLRI 5 anggota dan Fraksi Persatuan Amanat Ummat beranggotan 8 orang. Semasa otonomi daerah

Tabel 4. Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di Kabupaten Bangkalan tahun 2008 Putaran Ketiga

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Partai Politik	Jumlah Suara	%tase
1.	Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa)	PD-PAN	253.981	50,20
2.	Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji)	PPP-PKB	144.238	49,80
JUMLAH SUARA SAH			398.219	100,00

Sumber: diolah dari hasil rekapitulasi KPU Bangkalan

Dalam konteks ini, intimidasi dengan kekerasan fisik atau pun non-fisik (kata-kata) sebagai sumber kekuasaan seorang *blatèr* dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi keputusan politik dalam pemilihan kepala daerah di Bangkalan. Terkait dengan kekuasaannya, ia memiliki wewenang untuk menentukan arah kebijakan yang diinginkan. Sebab, ia sebagai *incumbent* berhak untuk mengeluarkan perintah atau membuat peraturan-peraturan dan berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang ia buat. Dengan *authority* yang ia miliki menegaskan bahwa ia adalah seorang tokoh kharismatik. Dengan kata lain, kharisma yang melekat pada diri *blatèr* akan mengalir secara hirarkis maupun non-hirarkis terhadap keluarga *blatèr* atau pun di luar keluarganya yang mempuni. Hal ini membuktikan bahwa keputusan politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan periode 2013-2018 dapat dipahami bahwa ada peran *blatèr* (*incumbent*) terhadap proses politik yang berlangsung di Bangkalan.

D. Peran Politik *Blater* Dalam Demokrasi Lokal

Pada tahun 2002 DPRD Kabupaten Bangkalan, harus memperoses pemilihan Bupati baru, menyusul jabatan Bupati Bangkalan H.M. Fattah akan berakhir tanggal 2 Februari 2003. Komposisi DPRD periode 1999 sampai 2004 terdiri dari 4 Fraksi yakni: Fraksi Kebangkitan Bangsa dengan jumlah 25 anggota, Fraksi PDI P

belum diimplementasikan, dan pemilihan kepala daerah masih mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang masih bersifat sentralistis, meskipun DPRD berwenang memilih kepala daerah, namun dalam kenyataannya campur tangan pusat masih sangat dominan. Pada waktu itu hampir dapat dipastikan bahwa hanya calon yang direstui oleh pemerintah pusat yang lebih cenderung berpeluang sehingga muncul istilah calon pendamping yang dipasang agar proses pemilihan tampak demokratis. Namun ketika otonomi daerah efektif berlaku kondisi tersebut berubah, dan peran pemerintah pusat tidak lagi dominan, mengingat kewenangan pemilihan daerah sudah diserahkan kepada daerah.

Akibatnya dinamika politik yang terjadi di daerah sepenuhnya berada di tangan rakyat setempat di mana mekanisme sepenuhnya dilaksanakan oleh DPRD. Dengan aturan main seperti itu, partai-partai politik di Kabupaten Bangkalan lalu mulai melaksanakan penjaringan parabakalcalonBupatidanwakilBupatiBangkalan periode 2003-2008 untuk kemudian disalurkan melalui fraksi-fraksi di DPRD. Pada waktu itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan penyeleksian untuk para kader partainya yang kelak akan dicalonkan Bupati dan wakil Bupati dari tingkat anak cabang hingga cabang. Semula ada 3 nama ulama NU di lingkungan PKB yang mencuat yakni; ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Drs. HM. Syafik Rofi'i, KH. Imam Bukhori (Ra Imam) dan RKH. Fuad Amin Imron (Ra Fuad). Sementara itu pencalonan RKH.

³² "Gerbang Pembuka Skandal Politik Jatim" (*online*), (<http://arsip.gatra.com/2014-12-08/majalah/artikel.php?pil=23&id=158245>, diakses 12 September 2015).

Fuad Amin Imron bukannya tanpa kontroversi sebagian kalangan di Kabupaten Bangkalan, mulanya memandang bahwa pencalonan figur Kiai Fuad Amin Imron (Ra Fuad) kurang tepat karena anggapan masyarakat adalah seorang kiai sebaiknya menempati fungsi ke-kiai-annya tanpa harus menjadi Bupati.

Sebab, jika hal itu gagal tentunya akan berpengaruh negatif terhadap reputasi para kiai secara keseluruhan. Kalangan ini berpendapat setiap figur punya tugas dan tempat masing-masing. *Lakonah lakoneh, kennengngennah kennengeh* (pekerjaannya kerjakan, tempatnya tempati). Meski demikian, kalangan ini tidak bermaksud menghalang-halangi pencalonan Ra Fuad, karena yang ingin ditegaskan ialah kiai bisa menjadi Bupati asal didukung dengan kemampuan yang memadai. Sementara kalangan lain berpendapat tidak masalah seorang kiai menjadi Bupati karena justru dapat menjadi panutan moral. Kaitannya dengan kemampuan dapat didukung oleh staf ahli sehingga tidak perlu dirisaukan. Kalangan ini berpendapat bahwa menjadi pengurus NU dipandang jauh lebih berat dari pada menjadi Bupati. Meskipun kedua pandangan tersebut berinteraksi, namun tidak membuat proses penjangkaran calon di PKB terganggu. Justru kedua pandangan tersebut membuat seleksi calon Bupati di internal PKB dilakukan secara ketat sehingga mutu calon Bupati di internal PKB lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Pada waktu itu figur calon mengerucut pada diri Ra Fuad. Dari sejumlah pengurus anak cabang (PAC) Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Bangkalan, 15 PAC memilih Ra Fuad dan sisanya terbagi kepada lainnya. Hal itu tak lepas dari dukungan KH. Abdullah Sachal sebagai tokoh sepuh kiai di Kabupaten Bangkalan, sehingga KH. Syafik Rofi'i dan KH Imam Bukhori pun mendukung pencalonan Ra Fuad. Termasuk juga dukungan dari Jaringan Kiai Kampung (JAKIPUNG). Mengingat masyarakat masih menganggap kiai sebagai patron dalam konteks kehidupan bermasyarakat menurut Aliman Harish. Sementara itu tahap-tahap pemilihan Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Bangkalan pada waktu itu diwarnai dinamika politik yang

memuncak dengan aksi berbagai demonstrasi. Unjuk rasa itu dipicu keputusan DPRD Bangkalan yang menolak laporan pertanggung jawaban (LPJ) akhir masa jabatan Bupati HM. Fatahdi mana rencananya akan kembali dicalonkan oleh pendukung sebagai Bupati Bangkalan untuk periode yang kedua kalinya.

Penolakan tersebut mengakibatkan tertutupnya peluang HM. Fatah untuk mencalonkan kembali menjadi Bupati bangkalan periode yang kedua (sesuai dengan persyaratan administratif yang telah ditetapkan panitia pemilihan Bupati dan wakil Bupati) sehingga para pendukungnya kemudian berunjuk rasa menentang keputusan itu dan menuntut proses pemilihan Bupati dihentikan. Namun aksi itu ditandingi oleh demonstran lain yang mendukung keputusan DPRD Kabupaten Bangkalan yang menginginkan proses pemilihan Bupati dan wakil Bupati tetap berlangsung. Pihak demonstran ini umumnya merupakan pendukung Kiai Fuad Amin Imron (Ra Fuad), calon kuat yang memang didukung massa secara riil. Demonstrasi diantara kedua belah pihak datang silih berganti mewarnai proses pemilihan kepada daerah Kabupaten Bangkalan. Data sekretariat DPRD Bangkalan menunjukkan bahwa pada tahun 2001 unjuk rasa di gedung dewan hanya terjadi 2 kali, namun jumlah masa demonstrasi itu meningkat tajam pada tahun 2002 menjadi 29 kali. Dari jumlah tersebut sebagian besar merupakan demonstrasi dalam menyampaikan aspirasi tentang pemilihan Bupati dan wakil Bupati. Pada tanggal 18 Desember 2002, DPRD Kabupaten Bangkalan menyelenggarakan sidang paripurna guna menetapkan nama-nama calon Bupati 37 dan wakil Bupati. Dalam sidang tersebut tercatat 3 fraksi masing-masing fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), fraksi Persatuan Amanat Ummat (PAU) dan fraksi TNI/Polri tidak mengajukan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) mengajukan nama calon Bupati RKH. Fuad Amin Imron dan Wakil Bupati Ir. H. Muhammadong. Sedangkan fraksi Persatuan Amanat Ummat mengajukan pasangan calon Bupati Ir. H Sulaiman dan wakil Bupati H. Sunarto.

Pemilihannya sendiri dilangsungkan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Bangkalan di gedung dewan pada tanggal 6 Januari 2003 dalam penjagaan ekstra ketat dari aparat keamanan menyusul maraknya masyarakat yang berunjuk rasa di luar gedung DPRD. Pasangan RKH. Fuad Amin Imron dan Ir. Muhammadong berhasil meraih kemenangan dengan perolehan 42 suara mengungguli rivalnya pasangan Ir. H. Sulaiman dan H. Sunarto yang hanya didukung oleh 3 suara.

Fuad Amin tercatat salah satu model politisi kuat skala lokal yang membangun dinasti politik di Bangkalan hampir tanpa tanding. Setelah menjabat Bupati selama dua periode, 2003-2013, mantan anggota DPR RI Fraksi Kebangkitan Bangsa (1999-2003) itu, sukses mewariskan tahta pada puteranya, Makmun Ibnu Fuad, Bupati Bangkalan saat ini. Begitu pindah partai menjadi Ketua DPC Gerindra Bangkalan, menjelang pemilu legislatif April 2014, Fuad berhasil memenangkan partai pimpinan Prabowo Subianto itu di Bangkalan. Fuad pun terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten ujung Barat Pulau Madura itu.³³

Kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat dapat dilihat dari sarana atau fasilitas yang melekat pada aktor tersebut. Sarana atau fasilitas yang dapat dijalankan oleh seseorang dalam memainkan peranannya adalah tergantung pada kedudukan atau status yang diembannya, biasanya melalui institusi sosial baik formal atau informal. Oleh sebab itu, *blatèr* sebagai aktor politik memiliki sarana atau fasilitas untuk memainkan peranannya adalah pesantren, lembaga pemerintah (eksekutif), *remo* dan *kerapan sapi*. Selain itu, *blatèr* juga didukung oleh seperangkat peran seperti jaringan *klebun* (kepala desa), pengusaha, tokoh masyarakat, dan kelompok *blatèr* lain. Hubungan-hubungan alami, seperti ayah atau paman, mungkin banyak dikaitkan dengan peran. Keduanya mungkin adalah persoalan tanggung jawab dan kompetensi, dan keduanya menjalankan semacam fungsi mediasi antara individu dan

masyarakat, dan membatasi masing-masing peran yang dimilikinya. Status yang melekat pada Fuad Amin baik sebagai *blatèr* atau pun kiai terdapat fasilitas atau sarana yang melekat pada dirinya.

E. Jaringan *Blater* Dalam Politik Elektoral

Pada tahun 2008, pemilihan kepala daerah secara langsung dimulai, DPP PKB merekomendasikan dan menetapkan nama RKH. Fuad Amin Imron sebagai calon Bupati dan Drs. KH. M. Syafik Rofii sebagai calon wakil Bupati tahun 2008-2013 untuk kemudian diteruskan kepada KPUD. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung langsung di Kabupaten Bangkalan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2008 diikuti oleh tiga pasang kandidat, yaitu pasangan dr. H. Abdul Hamid Nawawi-H. Hosyan Muhammad diajukan oleh PPP dengan nomor urut 1, Pasangan Ir. H. Muhammaddong-KH. Razak Hadi dicalonkan oleh koalisi Partai Demokrat dan PDIP dengan nomor urut 2. Serta pasangan RKH. Fuad Amin Imron-KH. Drs. M. Syafik Rofii'i diusung oleh PKB dengan nomor urut 3. Oleh karena itu, legitimasi politik dari hasil pemilihan kepala daerah secara langsung ini diharapkan akan semakin kuat sehingga proses pembangunan di Bangkalan akan berjalan lebih baik karena dukungan dan partisipasi politik masyarakat akan diprediksikan lebih berkualitas. Kemenangan pasangan RKH. Fuad Amin Imron dan KH. M. Syafik Rofii'i dalam pemilihan kepala daerah secara langsung akhirnya menjadi kenyataan dari total suara sah yang masuk, sebesar 462.210 ribu suara, pasangan RKH. Fuad Amin Imron dan Syafik Rofii'i dapat menyisihkan dua pasangan calon lainnya. Total perolehan suara pasangan RKH. Fuad Amin Imron dan KH. M. Syafik Rofii'i sebesar 373.422 ribu suara atau 80,79 persen sedangkan pasangan H. Muhammaddong - KH. Razak Hadi meraih 71.584 suara atau 15,49 persen, sementara pasangan dr. H. Abdul Hamid Nawawi - Hosyan Muhammad mendapat 17.204 suara atau 3,72 persen. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 5.

Pengalaman KH. Fuad Amin serta kedudukannya dalam tradisi masyarakat santri Bangkalan, sangatlah menentukan keberhasilan

³³ "Gerbang Pembuka Skandal Politik Jatim" (*online*), (<http://arsip.gatra.com/2014-12-08/majalah/artikel.php?pil=23&id=158245>, diakses 12 September 2015).

Tabel 5. Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2008

No. Urut	Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati	Partai Politik	Jumlah Suara	Persentase
1.	dr. H. Abdul Hamid Nawawi–H. Hosyan Muhammad	PPP	17.204	3,72
2.	Ir. H. Muhammadiyah–KH. Razak Hadi	PDIP-PD	71.584	15,49
3.	RKH. Fuad Amin Imron–KH. Drs. M. Syafik Rofii'i	PKB	373.422	80,79
JUMLAH			462.210	100,00

Sumber: Hasil Rekapitulasi KPUD Bangkalan

politiknya dalam menentukan relasinya. Sehingga mengantarkan KH Fuad Amin sebagai Bupati Bangkalan. Dengan dukungan penuh para kiai dalam pemerintahan Kabupaten Bangkalan serta ikatan primordialisme yang ikut mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilihnya untuk maju kembali dan memenangkannya pada pemilihan kepala daerah secara langsung 2008. Dalam kaitan ini RKH Fuad Amin Imron tidak mengalami kesulitan, pasalnya secara genealogi beliau merupakan bagian dari kiai itu sendiri. Bupati Bangkalan ini adalah cicit Syaikhona Kholil yakni seorang ulama yang menjadi guru bagi umumnya kiai-kiai yang berlatar belakang NU. Latar belakang genealogi inilah yang menjadi salah satu kunci kemenangannya. Selain peran kiai, terpilihnya RKH Fuad Amin dalam pemilihan kepala daerah secara langsung 2008 juga karena didukung oleh beragam simpul massa yang ada di masyarakat. Sejumlah tokoh masyarakat juga menjadi salah satu faktor kunci bagi kemenangannya, yaitu komunitas *blatèr* yang sejauh ini memiliki kedekatan batin dengan Fuad Amin.

Mayoritas dari komunitas *blatèr* mem-back up penuh Fuad Amin dalam pencalonan Bupati. Dari jajaran birokrasi hingga ke pelosok desa dan kelurahan juga ikut memberikan dukungan penuh kepadanya. Bahkan mereka secara diam-diam justru menjadi mesin politik yang cukup efektif dalam mengawal, mengantarkan dan mengamankan RKH Fuad Amin Imron pada jabatan Bupati Bangkalan untuk kali yang kedua ini. Komunitas lain yang juga ikut memberikan dukungan kepada kiai Fuad antara lain ormas. OKP, LSM, Paguyuban dan lembaga-lembaga sejenis lainnya. Pada pemilu 2012 setelah tidak

bisa mencalonkan lagi sebagai Bupati Bangkalan, RKH Fuad Amin berupaya meneruskan dinasti politik dengan mencalonkan anak laki-lakinya.³⁴

Basis sosial keagamaan dibangun melalui konstruksi sosial sebagai keturunan Syaikhona Kholil, ulama kharismatik yang menjadi panutan dan ikon spritual keberagaman kaum Nahdliyyin, khususnya di Bangkalan Madura. Dengan kharisma yang dimiliki oleh Syaikhona Kholil, dimanfaatkan oleh Fuad Amin untuk menopang kekuasaannya di Bangkalan. Basis sosial (ke)*blatèr*(an) digunakan juga melalui kendali atas jaringan para *klèbun* (kepala desa), yang umumnya berasal dari basis sosial *blatèr*. Kedekatannya dengan kedua basis sosial ini membuat FA dikenal dengan julukan kiai *blatèr*³⁵.

Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bangkalan pada tahun 2012 diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu Moh. Makmun Ibnu Fuad-Mondir Rofi'i (MAKMUR), Nizar Zahro-Zulkifli (NIKMAT), dan pasangan KH. Imam Buchori Kholil-Zainal Alim (IMAM-ZAIN). Dari ketiga pasangan calon tersebut, pasangan "MAKMUR" keluar sebagai pemenang dengan raihan suara 508.986 atau setara dengan (93,47%), jauh meninggalkan pasangan nomor urut 2, "NIKMAT" yang hanya mendapat 35.378 suara atau (6,353%). Kemenangan pasangan Makmun Ibn Fuad-Mondir Rofi'i (MAKMUR), tidak lepas dari

³⁴ Yudhi Rachman, "Pilkada, Dinasti Politik di Era Desentralisasi: Studi Habitus dan Field, Aktor Politik dalam Kontestasi Pilkada Kab, Bangkalan yang Melahirkan Dinasti Politik", Seminar Nasional Gender dan Budaya Madura III Madura: Perempuan, Budaya & Perubahan, (*online*), (<http://lppm.trunojoyo.ac.id/budayamadura/download>), diakses pada 15 Juli 2020).

³⁵ Abdur Rozaki, "Melawan Oligarki Politik Lokal", (*online*), (<https://adoc.pub/melawan-oligarki-politik-lokal-abdur-rozaki.html>), diakses 15 Juli 2020).

peran dan pengaruh politik para *blatèr*. Tentu, bicara peran politik *blatèr* tidak hanya dalam satu sisi, melainkan berbagai macam ragam peran yang melekat pada para *blatèr* dalam mendukung dan memenangkan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang mereka dukung.

Pasangan Bupati dan wakil Bupati tersebut didukung oleh 9 pengusung partai politik baik di parlemen maupun non parlemen. Sembilan partai politik yang mendukung pasangan MAKMUR adalah: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat (PD), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Gerindra, Hanura, Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Golkar. Mesin partai politik untuk memenangkan pasangan MAKMUR sangat efektif memperoleh dukungan dari konstituen masing-masing partai politik. Jika dibandingkan dengan pasangan lain seperti, pasangan NIKMAT yang hanya didukung oleh tiga partai politik yaitu Partai Republikan, Partai Bintang Reformasi, dan PNBKI.

Fuad berasal dari trah Bani Kholil, keluarga besar ulama legendaris Madura, hal itu membuatnya begitu disegani. Selain itu kemampuan Fuad menggunakan jaringan-jaringan penting di Bangkalan menjadi faktor utama. Ada tiga jaringan yang benar-benar dikuasai oleh “sang raja” atau sebutan lain “kanjeng³⁶” Bangkalan ini. Yakni, jaringan “klebun” (kepala desa), jaringan *blatèr*, dan birokrasi.³⁷

Untuk memuluskan pencalonan Makmun, Fuad menggunakan jaringan kepala desa atau *klebun* dan *blatèr*. Fuad memang memanfaatkan *klebun* untuk memenangkan dirinya sekaligus menangkap pesaingnya. Caranya, sejak menjabat Bupati Bangkalan pada 2003, Fuad mengisi jabatan *klebun* dengan mengangkat pejabat sementara. Fuad pun terus menunda pemilihan langsung kepala desa oleh warga. Kini, dari 281 jabatan kepala desa di Bangkalan, 200 di antaranya diisi pejabat sementara. Berkat dukungan penuh jaringan *klebun*, Makmun Ibnu Fuad terpilih sebagai Bupati Bangkalan pada usia 26 tahun. Berpasangan dengan Mondir Rofi,

Tabel 6. Basis Dukungan Partai Politik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangkalan tahun 2013-2018

NO. URUT	NAMA PASANGAN	PARTAI POLITIK	SUARA	%
2	Nizar Zahro – Zulkifli	Partai Republikan – PBR – PNBK	35.378	6,53
3	Moh. Makmun Ibn Fuad – Mondir Rofi'i	PAN – PKB – PD – PDIP – PPP – Gerindra – Hanura – PDP – PKS – Golkar	508.986	93,47

Sumber: diolah dari beberapa sumber

Pertama adalah perolehan suara Makmun Ibnu Fuad sebanyak 93% serta tercatat sebagai Bupati paling muda. Dia dilantik pada usia 26 tahun. Konflik besar-besaran di PKB, membuat Fuad memilih hengkang dan berlabuh di partai Gerindra. Di tangan Fuad, Partai Gerindra menjadi pemenang pemilu di Kabupaten Bangkalan. Dari total 45 kursi di DPRD Bangkalan saat ini, partai tersebut mendapat sepuluh kursi. Walhasil Fuad melenggang menjadi ketua dewan. Jadi, lembaga eksekutif dan legislatif di Bangkalan dikuasai oleh trah Fuad Amin. Makmun (anak) sebagai Bupati dan Fuad Amin (bapak) sebagai ketua DPRD periode 2014-2019. Lalu, bagaimana Fuad membangun dinasti kekuasaan? Karena

Makmun meraih 90% suara, mengalahkan pasangan Moh. Nizar Zahro-R.H. Zulkifli. Sedangkan pasangan calon Imam Bukhori-Zainal Alim dianulir Komisi Pemilihan Umum Daerah Bangkalan sepekan sebelum pencoblosan. Fuad kembali memakai jaringan *klebun* dan *blatèr* dalam Pemilihan Umum 2014. Membawa bendera partai Gerindra, ia menempatkan sepuluh wakil

³⁶ *Kanjeng* adalah panggilan yang dilekatkan pada Fuad Amin bagi sebagian masyarakat Bangkalan karena nama tersebut menunjukkan kuatnya otoritas yang dimiliki oleh Fuad Amin..

³⁷ “Dinasti Fuad dan Atut Produk Pilkada Langsung”, (*online*), (http://www.kompasiana.com/www.ambocraft.co.id/dinasti-fuad-dan-atut-produk-pilkada-langsung_54f3ae06745513982b6c7e94, diakses 15 Juli 2018).

partai itu di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, dia terpilih sebagai ketua DPRD Kabupaten Bangkalan periode 2014-2019.³⁸

Dinamika pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Bangkalan diwarnai dengan gugatan dari salah satu pasangan calon yaitu pasangan KH. Imam Buchori Kholil-Zainal Alim. Pasangan ini mengajukan gugatan kepada DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh lima anggota KPU Bangkalan Jawa Timur. Permohonan tersebut direspon oleh DKPP dengan menggelar sidang pemilihan kepala daerah (pemilihan kepala daerah secara langsung) Kabupaten Bangkalan Jawa Timur. Dalam sidang tersebut, DKPP memutuskan untuk menolak pengaduan pasangan Imam Buchori Cholil-Zainal Alim terkait dugaan kode etik lima anggota KPU Bangkalan Jawa Timur (Jatim). Di samping itu, sidang DKPP juga merehabilitasi lima anggota KPU Bangkalan. Mereka adalah, Fauzan Jakfar, Moh Mansyur, Syaiful Islam, Abdushomad, dan Tajul Anwar³⁹.

PENUTUP

Dalam tulisan ini dapat disimpulkan bahwa pertama, *blatèr* sebagai bos lokal memiliki kekuasaan yang sangat besar untuk menentukan pergantian kepemimpinan politik lokal di daerah dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. *Kedua*, pemilihan kepala daerah secara langsung telah menciptakan bos lokal baru atau orang kuat lokal seperti, *blatèr* untuk menguasai penguasaan politik di daerah. *Ketiga*, kuatnya pengaruh penguasaan politik lokal oleh seorang *blatèr* dapat buktikan ketika Fuad Amin (*blatèr*) terpilih sebagai Anggota DPR RI FPKB periode 1999-2004. Bukti kedua yaitu pada tahun 2003, Fuad Amin (*blatèr*) terpilih sebagai Bupati Bangkalan periode 2003-2008. Bukti ketiga, tahun 2004,

Fuad Amin sebagai sosok *blatèr* terpilih kembali menjadi Bupati Bangkalan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung di Bangkalan. Bukti keempat menunjukkan bahwa terpilihnya pasangan Makmun-Mondir pada pemilihan Bupati Bangkalan tahun 2012 secara langsung dengan perolehan suara hingga 90% merupakan peran politik *blatèr* yang sangat besar. Hal ini bertolak belakang dengan teori politik lokal yang dikemukakan oleh Gerry Stoker bahwa proses politik dalam pemilihan Kepala daerah yang berdampak pada sirkulasi elit bagian dari demokrasi lokal. Proses politik dalam pemilihan Bupati di Kabupaten Bangkalan telah memperlemah kualitas demokrasi lokal karena tidak ada kebebasan dalam partisipasi politik dan hak politik individu. Sehingga daerah dikuasai oleh bos lokal *blatèr* yang mengarah pada bentuk dinasti politik.

Fenomena lahirnya dinasti politik di aras lokal diawali dengan diberlakukannya pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun 2005 maupun implementasi otonomi daerah tahun 2001 di Indonesia. Implikasi regulasi dari kedua proses tersebut sebagai bukti dari demokratisasi di ranah lokal, ditandai tampilnya tokoh lokal atau elit lokal dari berbagai macam status sosial di daerah untuk *meng-capture* atau mengkooptasi kepentingan kekuasaan daerah. Otonomi daerah dan demokrasi langsung atau pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan peluang terhadap kekuatan informal atau elit informal dalam penguasaan politik pemerintahan lokal. Membuktikan bahwa fenomena politik informal atau elit informal di daerah didominasi oleh kuatnya pengaruh bos lokal (*local strongman*) yang dimaknai sebagai elit tunggal. Elit tunggal dalam ranah politik lokal menjadi variabel utama dalam menggunakan keluarga sebagai sumber kekuasaan. Ternyata desentralisasi memberikan peluang besar terhadap eksistensi "orang kuat lokal" dan terciptanya konsolidasi "orang kuat lokal". Secara faktual, desentralisasi telah dibajak oleh sebagian kepentingan predatoris atau penghisap lokal.

³⁸ "Fuad Amin, Klebun, dan Kekuasaan di Bangkalan", (*online*), (<https://catatanbaskoro.wordpress.com/2015/02/10/fuad-amin-klebun-dan-kekuasaan-di-bangkalan/>, diakses 2 Februari 2015).

³⁹ "Pakar Tata Hukum Negara Dukung Sikap KPU Bangkalan", (*online*), (<https://daerah.sindonews.com/read/734989/23/pakar-hukum-tata-negara-dukung-sikap-kpu-bangkalan-1365169036>, diakses 15 Juli 2018).

Keberlangsungan proses pemilihan kepala daerah secara langsung dalam setiap suksesi kepemimpinan selalu muncul kecenderungan dari kepala daerah yang berperan sebagai *king maker* untuk merubah peta kekuatan politik lokal yang akan melanjutkan peralihan kekuasaannya. Posisi kepala daerah sebagai *king maker* akan meredam sisi-sisi buruk kekuasaan terdahulu dengan mengangkat penggantinya dari keluarga sendiri. Hal inilah membuat kepala daerah memiliki wewenang memilih keluarganya untuk melanggengkan kekuasaan dan menutupi aib kekuasaannya di masa lampau.

Dalam konteks ini, terdapat tiga persoalan mendasar dalam demokrasi lokal yang melahirkan sebuah dilema demokrasi antara politik oligarki dan politik dinasti. *Pertama*, disfungsi partai politik di aras lokal karena terkooptasi oleh para elit lokal. *Kedua*, revitalisasi kekuatan tradisional dalam arena politik yang berbasis tribalisme, regionalisme, premanisme, dan lain sebagainya. *Ketiga*, tingginya *cost* politik dalam setiap pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang mereduksi partisipasi politik aktif dari masyarakat. Partisipasi politik yang esensinya sebagai bagian dari demokrasi langsung bahkan terjebak oleh kuatnya elit lokal dan proses pengajuan kandidat dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karena itu, untuk memperkuat demokrasi lokal di Indonesia dan membatasi pengaruh politik *local strongman* atau orangkuat lokal di daerah yaitu memperkuat proses pemilihan kepala daerah secara langsung dengan sistem pemilihan yang akuntabel dan transparan. Misalnya, sistem pemilihan dengan menggunakan *e-voting* terutama di tingkat lokal. Di sisi lain, aturan masa jabatan kepala daerah perlu diatur secara ketat dengan mengubah atau merevisi peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala daerah secara langsung. Misalnya, masa jabatan 2 periode dengan kurun waktu 5 tahun menjadi 7 tahun dalam 1 periode.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aminah, Siti. (2014). *Kuasa Negara pada Ranah Politik Lokal*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Barker, Rodney. (1990). *Political Legitimacy and the State*, Oxford: Clarendon Press.
- Creswell, John W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran* (terjemahan), Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadiz, Vedi R. (2005). *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*, Jakarta: LP3ES..
- Jackson, Karl D. (1989). *Kewibawaan Tradisional, Islam, dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat*, Jakarta: Grafiti Press.
- Masaaki, Okamoto dan Rozaki, Abdur (ed.). (2006). *Kelompok Kekerasan Dan Bos Lokal di Era Reformasi*, Yogyakarta: IRE Press.
- Migdal, Joel S. (1988). *Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World*, Princeton: Princeton University Press.
- Migdal, Joel S. (2004). *State in Society*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Nurhasim, Moch. (ed.). (2005). *Konflik Antar Elit Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rauf, Maswadi. (2001). *Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah Penajagan Teoritis*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Rozaki, Abdur. (2016). *Islam, Oligarki Politik dan Perlawanan Sosial*, Yogyakarta: SUKA Press dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

Sidel, John T. (1999). *Capital, Coersion and Crime: Bossism in the Philippines*, Stanford: Stanford University Press.

Jurnal

Berenschot, Ward. (2018). The Political Economy of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia's Patronage Democracy, *Comparative Political Studies*, 1-31, journal.sagepub.com/home/cps.

Djati, Wasisto Raharjo. (2013). Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal, *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*, Pusat Kajian Sosiologi, LabSosio FISIP-UI, Vol. 18, No. 2, Juli.

Epley, Jennifer L. (2015). Weber's Theory of Charismatic Leader: The Case of Muslim Leaders in Contemporary Indonesian Politics, *Internasional Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 5, No. 7, July.

Evaquarta, Rosa. (2010). Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal dalam Era Otonomi Daerah: Studi Perbandingan Batam dan Kutai Kartanegara, *Jurnal Studi Politik*, Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, edisi 1, Vol. 1, No.1..

Gracia-Lopez, Gustavo A. (2009). Elite Capture, Elite Persistence and Conflict in Cross-Scale Linkages in the Mexican Forest Commons, dalam Garcia-Lopez, Gustavo. (2009). *Elite Capture and Persistence*, *Dissertation* Chapter 5, Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Indiana University-Bloomington.

Meitzer, Marcus. (2009). Indonesia's 2009 Election: Populism, Dynasties and the Consolidation of the Party System, *Analysis* May.

Muhtadi, Burhanuddin. (2013). Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara "Party-ID" dan Patron-Klien, *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 10 No. 1, Juni.

Pratama, Rekha Adji. (2017). Patronase dan Klientalisme Pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017, *Jurnal Wacana Politik*, Vol.2, No. 1, Maret.

Scott, James C. (tanpa tahun). The Erosion of Patron-Client Bond and Social Change in Rural Southeast Asia, *Journal of Asian Studies*, V. XXXII, Number I.

Sidel, John T. (1997). Philippine Politics in Town, District, and Province: Bossism in Cavite and Cebu, *The Journal of Asian Studies*, Vol. 56, No. 4, Nov..

Skripsi/Tesis/Disertasi

Hutabarat, Melvin Perjuangan. (2012). Fenomena Bos Lokal di Indonesia Era Desentralisasi, *Tesis tidak diterbitkan*, Fisip Universitas Indonesia.

Internet

Dinasti Fuaddan Atut Produk Pilkada Langsung, (*online*), (http://www.kompasiana.com/www.ambocraft.co.id/dinasti-fuad-dan-atut-produk-pilkada-langsung_54f3ae06745513982b6c7e94, diakses 15 Juli 2018).

Dua Putaran di Jatim. (*online*). (<http://nasional.kompas.com/read/2008/07/24/00551591/dua.pUtaran.di.jatim>, diakses 15 Juli 2018).

Fuad Amin, Klebun, dan Kekuasaan di Bangkalan, (*online*), (<https://catatanbaskoro.wordpress.com/2015/02/10/fuad-amin-klebun-dan-kekuasaan-di-bangkalan/>. diakses 2 Februari 2015).

Gerbang Pembuka Skandal Politik Jatim. (*online*). (<http://arsip.gatra.com/2014-1208/majalah/artikel.php?pil=23&id=158245>, diakses 12 September 2015).

KPU Bangkalan Buka 5.098 Kotak SuaraPilpres, (*online*), (<https://www.tempo.co/read/news/2014/08/13/269599363/kpu-bangkalan-buka-5-098-kotak-suara-pilpres>, diakses 15 Juli 2018).

Pakar Tata Hukum Negara Dukung Sikap KPU Bangkalan, (*online*), (<https://daerah.sindonews.com/read/734989/23/pakar-hukum-tata-negara-dukung-sikap-kpu-bangkalan-1365169036>, diakses 15 Juli 2018).

Peta Pilgub Jatim 2008 dan Potret Kontestasi 2013, (*online*). (wartadesainfo.blogspot.com/2013/06/peta-pilgub-jatim-2008-dan-potret.html, diakses 15 Juli 2018).

Politik Indonesia. (*online*). (www.politikindonesia.com/index.php?, diakses 17 Juli 2014).

Rachman, Yudhi. (tanpa tahun). *Pilkada, Dinasti Politik di Era Desentralisasi: Studi Habitus dan Field, Aktor Politik dalam Kontestasi Pilkada Kab, Bangkalan yang Melahirkan Dinasti Politik, Seminar Nasional Gender dan Budaya Madura III Madura: Perempuan, Budaya & Perubahan*, (*online*), (<http://lppm.trunojoyo.ac.id/budayamadura/download>, diakses 15 Juli 2020).

Rozaki, Abdur. (tanpa tahun). *Melawan Oligarki Politik Lokal*, (*online*), (<https://adoc.pub/melawan-oligarki-politik-lokal-abdur-rozaki.html>, diakses 15 Juli 2020).

